

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**REVISI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan</li> <li>2. Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</li> <li>3. Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</li> <li>4. Jam layanan posbakum pada peradilan agama</li> <li>5. Administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama</li> <li>6. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 3 bulan</li> <li>7. Pedoman tata kelola di lingkungan peradilan agama</li> <li>8. Tenaga teknis peradilan agama yang berkompeten di bidang administrasi</li> <li>9. Pengadilaaan agama yang meningkatkan dalam pelayanan publik</li> </ol>	100%	2.672.068.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%				100%	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara	5%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	99,5%					
	• Banding						
	• Kasasi						
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%					
	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%					
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%					

<p><b>Meningkatnya Akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan</b></p>	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan  c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum  d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>100%  100%  100%  0%</p>	<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p>	<p>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan</li> <li>Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel</li> <li>Pedoman pengelolaan keuangan negara</li> <li>Laporan kegiatan biro keuangan</li> </ol>	
<p><b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b></p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>	<p>100%</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</p>		
<p>Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal</p>	<p>a. Persentase pengadilan yang ditindaklanjuti  b. Persentase temuan yang Ditindaklanjuti</p>	<p>100%  100%</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung</li> <li>Pengadaan Sertifikat Asat Tidak Bergerak di Pengadilan</li> <li>Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor</li> <li>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP</li> </ol>	
<p>Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif</p>	<p>a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif  b. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi</p>	<p>100%  100%</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</p>		
<p>Meningkatnya pengelolaan material lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien</p>	<p>a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima  b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)</p>	<p>100%  100%</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</p>		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Makki Ketua,  
Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Mukomuko, Januari 2019  
Panitera,

  
Drs. Zarkoni

Sekretaris,

  
Martoni Febriansyah, S.H.I